

PENGARUH KOMPETENSI APARATUR, PARTISIPASI MASYARAKAT, DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo)

Nur Syndah Apriliani¹, Anik Yuliati²,

Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

19013010060@student.upnjatim.ac.i¹, anikyuliati.ak@upnjatim.ac.i²

Received: April 6, 2024. **Revised:** May 3, 2024. **Accepted:** May 6, 2024 **Issue Period:** Vol.8 No.2 (2024), Pp 467-477

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menguji, membuktikan, dan menganalisis pengaruh kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Data primer berupa kuesioner yang disebar ke responden digunakan dalam penelitian ini. Dengan metode pengambilan sampel *random sampling* maka sampel yang digunakan sebanyak 100 responden di Kecamatan Waru. *Partial Least Square* merupakan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa variabel kompetensi aparatur tidak memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dan variabel partisipasi masyarakat. Sedangkan variabel pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Adapun implikasi dan saran dalam penelitian ini adalah hendaknya pengendalian internal yang kuat dapat membantu mencegah potensi kecurangan dan penyalahgunaan dana. Sehingga dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik yang tidak etis dan merugikan. Dengan adanya akuntabilitas yang ditingkatkan, partisipasi masyarakat yang aktif, dan penggunaan dana yang transparan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dan proses pengelolaan dana desa akan meningkat.

Kata kunci: *kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, pengendalian internal dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.*

Abstract - *The aim of this research is to test, prove and analyze the influence of apparatus competency, community participation and internal control on accountability in village fund management. This research uses primary data in the form of distributed questionnaire data. The sample used was 100 respondents in Waru District, random sampling method. The analysis used in this research is partial least squares. Based on the research results, it can be concluded that the apparatus competency variable has no effect on the accountability of village fund management and the community participation variable. Meanwhile, the internal control variable influences the accountability of village fund management. The implications and suggestions are that strong internal controls can help*



DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

prevent potential fraud and misuse of funds. This can create an environment free from unethical and harmful practices. With increased accountability, active community participation, and transparent use of funds, it is hoped that community trust in local government and the village fund management process will increase.

Keywords: apparatus competency, community participation, internal control and accountability in village fund management.

I PENDAHULUAN

Pemerintah mengalokasikan dana desa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat desa. Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan kepada desa-desa dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan pengembangan potensi lokal. Pengelolaan dana yang efektif, transparan, dan akuntabel menjadi hal yang sangat krusial untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan dana desa seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan utama yaitu masalah akuntabilitas dalam penggunaan dana tersebut. Akuntabilitas mencakup pertanggungjawaban, transparansi, dan keterlibatan seluruh pihak terkait dalam pengelolaan dana desa. Kualitas akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat dan sistem akuntansi keuangan desa [1]. Sistem akuntansi keuangan desa memiliki peran penting dalam mencatat dan melacak setiap transaksi keuangan terkait dana desa. Sistem akuntansi yang baik akan memberikan informasi keuangan yang akurat, terkait dengan penerimaan dan pengeluaran dana desa. Selain itu, sistem akuntansi yang terintegrasi dan memenuhi standar akuntansi yang berlaku akan memfasilitasi pelaporan keuangan yang tepat waktu dan akuntabel. Sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2019 Tentang Desa bertujuan memberikan pegakuan dan kejelasan kepada desa akan status dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tiap kabupaten dan kota menerima dana perimbangan sebesar 10% yang disebut alokasi dana desa (Undang-Undang Nomor 6 Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 72 Tentang Desa). Untuk menilai kinerja pemerintah, juga digunakan pengukuran kinerja yang menjadi salah satu indikator dalam akuntabilitas kinerja publik khususnya dalam pengelolaan dari Program Alokasi Dana Desa. Dari beberapa cuplikan berita dari DPR (RI n.d.) bahwa terdapat persoalan mengenai dana desa ditahun 2018 pada 80 kabupaten, 5 kota, dan 1006 kecamatan di seluruh Indonesia dalam aspek penindakan dan pengarahannya. Permasalahannya pada aspek program kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan penggunaan alokasi dana desa, sedangkan aspek penindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang belum mempertimbangkan risiko dengan membuat rencana dan penindakan dari permasalahan yang lain menurut Umaira 2023 [2], bahwa diperkirakan sebanyak 32.000 desa belum memiliki kompetensi teknokratik desa, khususnya yang terkait dengan keuangan pernyataan, dengan pernyataan yang dikeluarkan Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan setidaknya 14 isu kritis terkait dengan pengelolaan dana desa seperti kelembagaan, aspek pengelolaan, kualitas laporan keuangan, serta pengendalian internal yang dilakukan sumber daya manusia.

Transparansi dalam pengelolaan dana desa merupakan aspek krusial yang membawa manfaat. Alih-alih menjadi ancaman, keterbukaan justru membantu mencegah penyimpangan dana dan mendorong tata kelola pemerintah desa yang baik. Masyarakat Desa Waru pun sangat menginginkan transparansi ini. Mereka ingin akses informasi yang terbuka mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD). Keterbukaan informasi ini penting bagi masyarakat untuk mengawal proses pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dengan informasi yang transparan, masyarakat dapat memastikan bahwa dana desa benar-benar digunakan untuk kepentingan kesejahteraan mereka, bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.



II MATERIAL DAN METODE

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas atau yang juga dikenal sebagai pertanggungjawaban, adalah keharusan bagi setiap individu untuk menyelesaikan semua tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih dari itu, akuntabilitas juga berfungsi sebagai dorongan psikologis yang memotivasi individu untuk bertanggung jawab atas semua perilaku dan keputusan yang diambil kepada orang lain di lingkungannya. Salah satu parameter yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas individu adalah seberapa besar keinginan individu atau motivasi dalam individu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Motivasi adalah dorongan dalam diri individu untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Mardiasmo pada tahun 2009 dalam jurnal R. Asoka dan C. Romanda tahun 2023 [3] akuntabilitas publik adalah kewajiban bagi pihak yang diberi amanah (agen) untuk menjelaskan, melaporkan, dan mengungkapkan semua aktivitas dan tugasnya kepada pihak yang memberi amanah (*principal*) yang memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban.

Kompetensi Aparatur

Demi mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dana desa, dibutuhkan aparatur desa yang kompeten [4]. Menurut N. Hasibuan Sarah tahun [5] kompetensi adalah perpaduan antara pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki seseorang dan diterapkan dalam pekerjaannya. Tingkat kompetensi dapat dinilai berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan, dan keterampilan yang dimiliki. Kebijakan aparatur desa harus terdapat tingkatan keahlian, perilaku etis, dan integritas yang diperlukan. Kompetensi aparatur desa meliputi kapasitas, yaitu kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi dan kewenangannya dengan menghasilkan keluaran dan hasil yang optimal. Penerapan sumber daya manusia berbasis kompetensi dapat dilihat dari keseluruhan proses penilaian akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme maka peningkatan kualitas sumber daya pegawai secara terencana, terarah, dan berkelanjutan harus menjadi prioritas. Blanchard & Thacker tahun 2019 [6] menyatakan bahwa kemampuan seseorang dapat dilihat dari seberapa baik orang tersebut dalam melaksanakan tugas- tugas spesifik seperti mengoperasikan peralatan, menerapkan pengendalian internal yang efektif, atau menjalankan strategi bisnis.

Partisipasi Masyarakat

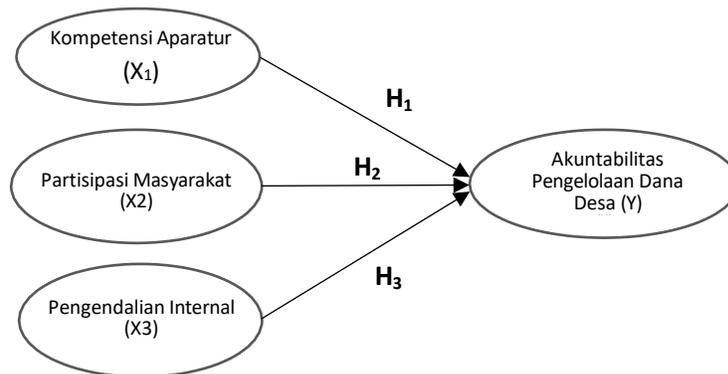
Partisipasi merupakan keterlibatan aktif individu dalam interaksi sosial. Dalam konteks masyarakat, partisipasi diartikan sebagai keterlibatan aktif masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari identifikasi masalah dan potensi, pemilihan solusi, pelaksanaan upaya pemecahan masalah, hingga evaluasi perubahan yang terjadi [7]. Partisipasi masyarakat dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan politik, partisipasi dalam program pembangunan, partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan, hingga partisipasi dalam inisiatif lokal atau kelompok masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam konteks pembangunan dan pengelolaan publik karena dapat meningkatkan efektivitas, keberlanjutan, dan penerimaan terhadap kebijakan atau program yang dilakukan. Melalui partisipasi, masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan mereka, serta berperan aktif dalam merumuskan dan memengaruhi kebijakan dan program yang akan berdampak pada kehidupan mereka. partisipasi masyarakat dapat mencakup berbagai tingkatan intensitas, mulai dari partisipasi pasif seperti memberikan masukan atau informasi, hingga partisipasi pasif seperti pengambilan keputusan bersama atau keterlibatan dalam pelaksanaan kegiatan. Tujuan utama partisipasi masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, pemberdayaan, dan pengaruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan atau program yang memengaruhi mereka.

Pengendalian Internal



Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2018, Sistem Pengendalian Internal (SPI) dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) [8] adalah dua sistem yang saling terkait yang bertujuan untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. SPI didefinisikan sebagai proses berkelanjutan yang dilakukan oleh semua pihak dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, menghasilkan pelaporan keuangan yang akurat, menjaga keamanan asset negara, dan memenuhi peraturan perundang-undangan. Sedangkan SPIP merupakan penerapan SPI secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. Kedua sistem ini penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan asset negara, serta untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan dan penyimpangan.

Kerangka Berpikir



Gambar 1. Diagram Kerangka Berpikir

III METODE PENELITIAN

Metode Penelitian

Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan data primer dan *survey research* kuantitatif. Objek yang digunakan pada penelitian ini adalah Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Teknik sampel jenuh merupakan teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sehingga dapat ditentukan bahwa sampel dari penelitian ini adalah seluruh aparatur desa di Kantor Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari Kasi, Kaur, Kades, dan Kasum.

Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel berupa *random sampling*, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$n = N : (1 + Ne^2). n = 10.900 : (1 + 10.900 (0,1)^2), n = 99,90.$$

Jika dibulatkan menjadi 10, maka sampel yang diambil sebanyak 100 responden.

Metode Analisis Data

Statistik inferensial merupakan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Statistik inferensial adalah teknik analisis untuk menarik kesimpulan mengenai data populasi dengan memanfaatkan data sampel. Uji *Partial Least Square (PLS)* digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan terikat. Pada penelitian ini analisis data menggunakan *software* aplikasi statistika Smart PLS 3.2.6. Menurut Sugiyono mendefinisikan PLS sebagai metode statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel. Metode ini memungkinkan pengujian



pengukuran dan model struktural secara simultan. PLS dinilai sebagai alat yang tepat untuk mengembangkan teori dan membangun teori baru, terutama ketika datanya terbatas dan tidak memenuhi asumsi statistik klasik. Menurut Ghazali tahun 2018 [9], menjelaskan bahwa PLS dapat digunakan sebagai salah satu metode alternative SEM (*Structural Equation Model*) berbasis varian yang dapat digunakan untuk menganalisis model-model yang kompleks. Kelebihan lain dari PLS adalah kemampuannya untuk menganalisis variabel yang tidak dapat diukur secara langsung. Hal ini menjadikan PLS sebagai metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang melibatkan variabel laten atau abstrak. Proses analisis PLS terdiri dari dua tahap evaluasi, sebagai berikut :

1. Evaluasi Model Pengukuran (*Outer Model*)

Menurut Sugiono tahun 2018 [10] *outer model* atau model pengukuran merupakan bagian dari model statistik yang menjelaskan hubungan antara indikator dengan variabel latennya. Tujuan utama dari *outer model* adalah untuk mengetahui validitas dan reliabilitas dari indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten. Dengan kata lain, *outer model* membantu dalam menilai apakah indikator yang digunakan mampu mewakili variabel latennya dengan baik dan konsisten. Rumus persamaan *outer model* dapat disusun sebagai berikut :

$$X = \hat{x} \xi + \epsilon_x \quad Y = \hat{y} \eta + \epsilon_y$$

Dalam PLS x dan y mewakili indikator variabel independen dan dependen. Indikator ini berfungsi untuk mengukur variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung. Matrik loading, dilambangkan dengan \hat{x} dan \hat{y} yang menunjukkan kekuatan hubungan antara indikator dan variabel latennya. Nilai – nilai dalam matrik loading ini merupakan koefisien regresi yang menghubungkan variabel laten dan indikatornya. Tingkat kesalahan dilambangkan dengan ϵ dan η , mencerminkan ketidakpastian dalam pengukuran indikator. Kesalahan ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kesalahan pengukuran instrument, variasi individu responden, dan faktor lainnya. Evaluasi model pengukuran dalam PLS dilakukan menggunakan uji reabilitas agar dapat dipastikan bahwa indikator yang digunakan memiliki reabilitas yang cukup, yaitu konsisten dalam mengukur variabel latennya. PLS menggunakan dua metode untuk menguji reabilitas, yaitu *Cronbach's alpha* dan *Composive reliability*. *Cronbach's alpha* mengukur batas bawah nilai konstruk, sedangkan *Composive reliability* digunakan untuk mengestimasi konsistensi internal suatu konstruk.

2. Evaluasi Model Struktural (*inner Model*)

Menurut Sugiyono tahun 2018 [10] mendefinisikan *inner model* atau model struktural dalam PLS merupakan bagian dari model statistik yang menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel laten. Inner model disusun berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis penelitian yang diajukan. Tujuannya untuk menguji hipotesis penelitian dan menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel laten. Pengujiannya dilakukan dengan ketentuan model dikatakan berpengaruh apabila nilai $P > 0,05$. Berikut adalah rumus persamaan *inner model* :

$$\eta = \alpha + \beta \eta + r\epsilon + \zeta$$

Keterangan :

η = Vektor variabel Independenn ϵ = vektor variabel dependenn

ζ = vektor residual (unexplained variance)

Uji Hipotesis

Sugiyono tahun 2018 [10] berpendapat bahwa dalam PLS pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan nilai signifikansi. Nilai signifikansi ini dibandingkan dengan tingkat signifikansi, yaitu sebesar 5% atau 0,05. Sedangkan kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah H_a diterima dan H_0 ditolak ketika nilai signifikan $< 0,05$. Untuk menolak hipotesis menggunakan nilai signifikan, H_0 diterima jika nilai signifikan $> 0,05$.

IV PEMBAHASAN DAN HASIL

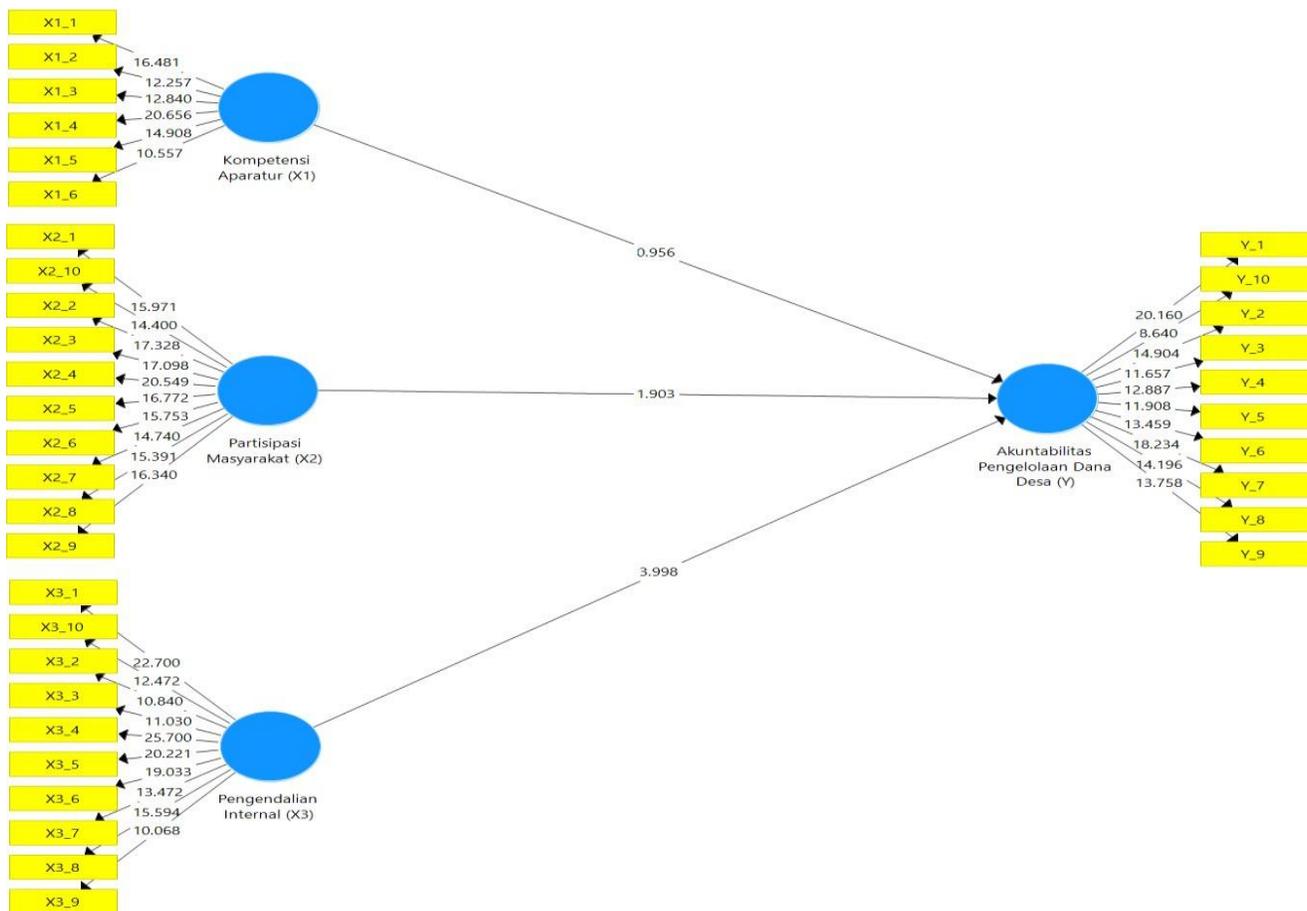
Hasil Analisis Data



DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Dalam PLS, terdapat dua urutan pengujian model yang penting. Pertama, pengujian model pengukuran. Pengujian ini bertujuan untuk memverifikasi validitas dan reabilitas indikator yang digunakan untuk mengukur variabel laten. Hal ini dilakukan agar dapat dipastikan bahwa indikator yang digunakan benar-benar mewakili variabel laten dan konsisten dalam pengukurannya. Kedua, pengujian hipotesis struktural. Setelah model pengukuran terverifikasi, pengujian hipotesis struktural dapat dilakukan. Pengujian ini bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel laten dalam model struktural, sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Hasil algoritma dapat dilihat dalam bentuk data model penelitian yang menampilkan skor *loading* (*outer loading*). Dengan menggunakan Smart PLS kemudian model dieksekusi dengan *PLS Alogarithm* dan tampilan *PLS Alogarithm* pada gambar sebagai berikut :



Sumber : Smart PLS 3

Dilihat dari hasil Alogaritma PLS pada gambar tersebut, terdapat pada variabel kompetensi aparatur, dan pengendalian internal memiliki nilai korelasi diatas 0,70. Namun demikian pada riset tahap pengembangan skala loading 0,50 sampai 0,60 masih dapat diterima. Hasil *output* grafif Smart PLS tampak pada gambar 1 yang telah memenuhi *convergent validity* karena semua faktor loading berada di atas 0,50.

Uji Partial Least Square

Uji validitas menggunakan korelasi *product moment pearson* dengan tingkat signifikasi yang digunakan adalah 5% = 0,05. Untuk menilai *discriminant validity* yang baik adalah dengan melihat nilai *Avarage Variance Extracted (AVE)* pada



tabel 1 yang menunjukkan bahwa masing-masing konstruk nilanya lebih besar dari 0,50. Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan tabel 1,dapat disimpulkan bahwa semua konstruk variabel memenuhi kriteria valid. Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* untuk semua konstruk variabel diatas 0,50, sebagaimana kriteria yang direkomendasikan. Jadi, data yang digunakan dalam peelitian ini valid. Berikut merupakan tabel hasil dari perhitungan PLS.

Tabel 1
Uji Validitas Construct Reliability and Validity

	Average Variance Extracted (AVE)
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.629
Kompetensi Aparatur (X1)	0.602
Partisipasi Masyarakat (X2)	0.620
Pengendalian Internal (X3)	0.643

Sumber : Smart PLS 3

Outer Model

Outer model dalam Smart PLS menggunakan uji reabilitas yang digunakan untuk menguji akurasi instrument pengukur variabel dan seberapa akurat jika dilakukan juga uji reabilitas konstruk yang diukur dengan *composite reability* dari blok indikator yang mengukur konstruk. Berikut merupakan hasil perhitungan *outer model* :

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas Construct Reliability and Validity

	Cronbach's Alpha
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.934
Kompetensi Aparatur (X1)	0.867
Partisipasi Masyarakat (X2)	0.932
Pengendalian Internal (X3)	0.938

Sumber: Smart PLS 3

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada tabel berikut menunjukkan bahwa konstruk variabel dinyatakan reliabel jika memiliki *composite reability* di atas 0,70. Hasil output Smart PLS menunjukkan semua konstruk variabel memiliki nilai di atas 0,70. Jadi dapat disimpulkan bahwa konstruk variabel memiliki reabilitas yang baik dalam penelitian ini.

Inner Model

Penguujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk nilai signifikansi dan *R-square* dari model penelitian. Model struktural dievaluasi dengan menggunakan *R-square* untuk konstruk dependen uji-t serta signifikansi dari koefisien parameter jalur struktural. Dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel.

Berikut merupakan tabel hasil uji *inner model* :



DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Tabel 3 Nilai R-Nilai R-Square

	R Square	R Square Adjusted
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.610	0.598

Sumber: Smart PLS 3

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan pada tabel tersebut, dapat diketahui bahwa besarnya nilai signifikansi yang diperoleh yaitu sebesar 0,610. Tabel tersebut menunjukkan nilai R-Square untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa diperoleh sebesar 0,610. Hasil menunjukkan bahwa 61,0% variabel Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pengendalian Internal memengaruhi variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan sisanya 49% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Hipotesis

Berikut merupakan hasil uji hipotesis dengan menggunakan path koefisien, T-Value, dan P-

Value. Tabel 4 Hasil Uji Hipotesis
Path Coefficients T-Values, P-Values

	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values
Kompetensi Aparatur (X1) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.149	0.140	0.156	0.956	0.340
Partisipasi Masyarakat (X2) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.249	0.269	0.131	1.903	0.058
Pengendalian Internal (X3) -> Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.503	0.500	0.126	3.998	0.000

Sumber: Smart PLS 3

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dihasilkan uji hipotesis sebagai berikut



DOI: 10.52362/jisamar.v8i2.1502

Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Uji Hipotesis 1

Hipotesis 1 menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, terbukti tidak berpengaruh. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 1, pada tabel tersebut yang menunjukkan bahwa hubungan variabel kompetensi aparatur dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,340. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa kompetensi aparatur tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian hipotesis 1 ditolak.

Uji Hipotesis 2

Hipotesis 2 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, terbukti tidak memberikan pengaruh. Hal ini disebabkan karena hasil pengujian hipotesis 2 menunjukkan bahwa hubungan variabel partisipasi masyarakat dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,058. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dengan demikian hipotesis 2 ditolak.

Uji Hipotesis 3

Hipotesis 3 yang menyatakan bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa terbukti berpengaruh. Hal ini disebabkan karena pengujian hipotesis 3 menunjukkan bahwa hubungan variabel pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai sig tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis partial least square dan hasil uji-uji lainnya yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model regresi yang dihasilkan adalah cocok untuk variabel kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan karena tingkat kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yang masing-masing menunjukkan hasil yang beragam, sehingga memengaruhi kenaikan maupun penurunan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1. Pengaruh Kompetensi Aparatur (X1) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada *P Vaalues* sebesar $0,340 > 0,05$ yang berarti bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kompetensi aparaturnya dapat diipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan pelatihan yang diterima. Apabila aparaturnya memiliki pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait dengan pengelolaan keuangan dan administrasi desa, hal ini dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengelola dana desa dengan baik.

Aparatur desa kurang mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang memadai terkait dengan pengelolaan keuangan dan administrasi desa, kemampuan mereka untuk melaksanakan tugas dengan baik dan akuntabel bisa terbatas. Kompetensi aparatur mungkin tidak dapat diaplikasikan secara efektif jika desa tidak memiliki sistem pengendalian internal yang memadai. Tanpa mekanisme kontrol yang baik, potensi untuk terjadi ketidakakuntabelan dapat meningkat. Jika informasi terkait pengelolaan dana desa tidak transparan atau tidak jelas, kompetensi aparatur mungkin tidak dapat diterapkan dengan baik untuk meningkatkan akuntabilitas. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Enggar tahun 2020 [11] yang menemukan bahwa ada pengaruh signifikan antara kompetensi aparatur terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat (X2) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)



Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada *P Values* sebesar $0,058 > 0,005$ yang berarti bahwa signifikansi lebih besar dari 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat tidak memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jika partisipasi masyarakat hanya sebatas formalitas dan tidak melibatkan keterlibatan aktif dari warga, efeknya terhadap akuntabilitas bisa minim. Partisipasi bersifat simbolis tanpa adanya keterlibatan nyata dapat mengurangi dampaknya. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi terkait pengelolaan dana desa, partisipasi mereka mungkin terbatas dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap akuntabilitas. Transparansi informasi sangat penting dalam menggali dukungan masyarakat. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya akuntabilitas dan dampak dari partisipasinya rendah, mereka mungkin kurang termotivasi untuk mengawasi atau mengkritisi pengelolaan dana desa. Masyarakat yang mengalami keterbatasan kapasitas, baik dalam hal pengetahuan atau sumber daya, mungkin mengalami kesulitan dalam berpartisipasi secara efektif. Ini dapat memengaruhi kemampuan mereka untuk memahami dan mengawasi pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Umaira [2], dan Mada [12] menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Pengendalian Internal (X3) terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, hasilnya menunjukkan bahwa nilai signifikansi pada *P Values* sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa signifikansi lebih kecil dari 0,05. Pengujian ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin baik dan besarnya pengendalian internal yang didapat maka akan semakin menambah akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengendalian internal membantu memastikan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan oleh desa. Dengan memastikan bahwa data keuangan tercatat dengan benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, pengendalian internal meningkatkan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Melalui mekanisme pengendalian internal, desa dapat memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan peruntukannya. Hal ini dapat mencakup penerapan prosedur yang mengatur penggunaan dana, pencegahan penyalahgunaan, dan pemantauan pelaksanaan program-program pembangunan.

V KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kompetensi aparatur dan partisipasi masyarakat tidak mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Pengendalian internal memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Hal ini berarti bahwa pengendalian internal yang baik pada suatu desa dapat menjadi faktor atas akuntabilitas pengelolaan dana desa Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi pengendalian internal yang kuat dapat membantu mencegah potensi kecurangan dan penyalahgunaan dana. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik-praktik yang tidak etis dan merugikan. Dengan adanya akuntabilitas yang ditingkatkan, partisipasi masyarakat yang aktif, dan penggunaan dana yang transparan, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dan proses pengelolaan dana desa akan meningkat. Pengendalian internal yang efektif juga berdampak pada penegakan aturan dan kebijakan yang berlaku. Keberadaan mekanisme pengawasan dapat membantu memastikan bahwa aturan dan kebijakan diikuti secara konsisten.

Hasil penelitian ini memiliki keterbatasan, yaitu sampel yang digunakan hanya desa di Kecamatan Waru yang berjumlah 4 desa, sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di desa se-Kabupaten Sidoarjo. Selain itu penelitian ini juga mempunyai keterbatasan variabel dimana variabel yang diteliti hanya kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan



pengendalian internal. Sedangkan mungkin masih ada variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang memengaruhi akuntabilitas dana desa. Penelitian ini selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, misalnya seluruh desa se-Kabupaten Sidoarjo serta perlu dilakukan penelitian ulang dengan aspek yang sama untuk mengetahui konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel yang diduga dapat memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, misalnya seperti sistem keuangan desa, penyajian laporan pertanggungjawaban, gaya kepemimpinan, dan standar akuntansi pemerintah.

REFERENSI

- [1] Y. A. Zhafira Alya, Febrianty Maya L., “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dan Faktor Yang Mempengaruhinya,” vol. 7, no. 1, pp. 131–143, 2022.
- [2] A. Umaira Siti, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa,” *J. Ris. Ilmu Akunt.*, vol. 4, no. 2, pp. 107–118, 2023.
- [3] R. Asoka and C. Romanda, “Analisis Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Kasus Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin),” *J. Ilm. Akunt. Rahmadiyah*, vol. 6, no. 1, p. 49, 2023.
- [4] P. P. Wardani, “Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang),” *Ilmiah*, pp. 1–19, 2021.
- [5] N. Hasibuan Sarah, “Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu,” vol. 8, no. 2, 2020.
- [6] J. W. T. P. Nick Blanchard, *Effective Training : System, Strategies, And Procces*, 6th ed. Chicago Business Press, 2019.
- [7] M. Muslimin, M. Mappamiring, and S. Nurmaeta, “Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Punagaya Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto,” *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 2, no. 1, pp. 79–85, 2019.
- [8] P. P. Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*, vol. 60. Jakarta: Pemerintah Pusat, 2008.
- [9] Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program IB< SPSS 19.0*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2018.
- [10] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- [11] E. W. Pahlawan, A. Wijayanti, and S. Suhendro, “Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa,” *Indones. Account. J.*, vol. 2, no. 2, p. 162, 2020.
- [12] S. Mada, L. Kalangi, and H. Gamaliel, “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo,” *J. Ris. Akunt. Dan Audit. “Goodwill,”* vol. 8, no. 2, pp. 106–115, 2017.

